

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang uraian dan penjelasan deskripsi data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan software SPSS versi 15.0. Penjelasan lebih lanjut hasil penelitian dan pembahasan disajikan sebagai berikut:

A. Gambaran Umum Objek/ Subjek Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016. Penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS versi 15. Jumlah populasi secara keseluruhan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan sebanyak 459 perusahaan, Dari 459 hanya 171 perusahaan Non-keuangan yang dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk mengukur variabel. Hasil seleksi sampel dapat ditunjukkan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1

Hasil Seleksi Sampel

KRITERIA SAMPEL	Jumlah
Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016	459
Perusahaan yang tidak memiliki informasi yang diperlukan sebagai alat ukur variable yang dibutuhkan dalam penelitian ini.	(288)
Total Sample	171

B. Uji Kualitas Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini menyediakan nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi biasanya digunakan untuk menggambarkan profil data sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.2
Hasil Uji Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MANDSCORE	171	.47	.78	.6166	.06814
KMA	171	.00	.89	.0830	.15221
KIN	171	.02	.99	.6171	.19742
PRKI	171	.14	1.00	.3866	.10982
FRKA(%)	171	.53	1.00	.9533	.09251

Sumber : *Output SPSS, 2018*

Tabel di atas menunjukkan jumlah profil data sampel (N) sebanyak 171 sampel. Variabel tingkat *mandatory disclosure* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,6166. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat *mandatory disclosure* sudah cukup tinggi dengan persentase sebesar 61,66% dari seluruh pengungkapan wajib dalam laporan keuangan secara penuh. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,06814 berarti ukuran penyebaran dari tingkat *mandatory disclosure* adalah sebesar 0,06814 dari 171 kasus yang terjadi. Artinya variasi dari *mandatory disclosure* dalam laporan keuangan yang

dipublikasikan relatif cukup homogen antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya.

Pada variabel persentase kepemilikan manajerial (KMA) yang merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen memiliki rata-rata sebesar 8,3%. Hal ini berarti hanya sebagian kecil saja saham-saham yang dimiliki oleh manajemen, sedangkan sisanya dimiliki oleh pemerintah atau institusi dan publik. Sedangkan standar deviasi sebesar 15,221, menunjukkan bahwa ukuran penyebaran struktur kepemilikan cukup tinggi karena lebih besar dari nilai rata-ratanya. Artinya jumlah kepemilikan manajemen antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya cukup berbeda jauh, terbukti dari beberapa perusahaan tidak memiliki struktur kepemilikan ini, sementara perusahaan lainnya memiliki dengan jumlah yang bervariasi.

Hasil deskriptif terhadap kepemilikan institusional (KIN) diperoleh rata-rata sebesar 0,6171 yang berarti rata-rata saham yang dimiliki oleh perusahaan institusi adalah sebesar 61,71% dari total seluruh kepemilikan saham yang ada. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham pada perusahaan non keuangan di Bursa Efek Indonesia mayoritas dikuasai oleh kepemilikan kepemilikan institusi, dan sisanya dimiliki oleh manajerial dan publik.

Dari analisis deskriptif diatas menunjukkan bahwa rata-rata proporsi dewan komisaris Independen (PRKI) memiliki rata-rata sebesar 0,3866 yang berarti rata-rata perusahaan memiliki dewan komisaris independent

38,66% dari seluruh dewan komisaris yang ada. Dengan demikian perusahaan telah memiliki komisaris independen yang cukup untuk memberikan pengawasan manajerial perusahaan, dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh BAPEPAM yaitu minimal 30% dari komisaris yang ada. Dengan standar deviasi sebesar 0,10982 menunjukkan ukuran penyebaran komposisi dewan komisaris cenderung homogen, karena lebih kecil daripada nilai rata-ratanya

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel jumlah rapat Komite Audit (FRKA) memiliki nilai rata-rata sebesar 95,33%. Hal ini berarti rata-rata dalam satu tahun komite audit yang ada melakukan rapat rata-rata 95,33% dari maksimum rapat komite audit yang dilakukan. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,09251, menunjukkan bahwa ukuran penyebaran data jumlah rapat komite audit lebih rendah dari nilai rata-ratanya, sehingga jumlah rapat antara perusahaan satu dengan yang lainnya perbedaannya cukup besar.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk menguji validitas dari hasil analisis regresi linier berganda. Adapun pengujian yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang dipergunakan pada variabel penelitian telah berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji data berdistribusi normal menggunakan uji

Kolmogorov Smirnov. Jika nilai probabilitas (sig) pada uji Kolmogorov Smirnov Test $> 0,05$, maka data berdistribusi normal dan sebaliknya jika $\text{sig} \leq 0,05$ data tidak berdistribusi normal. Hasil uji Kolmogorov Smirnov dapat ditunjukkan pada Tabel 4.3

Tabel 4.3
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	171
Kolmogorov-Smirnov Z	.767
Asymp. Sig. (2-tailed)	.598

Sumber: Output SPSS 2018

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 0,767 dan probabilitas (sig) sebesar 0,598. Dengan demikian nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data-data penelitian yang digunakan dalam analisis regresi telah berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen dalam sebuah model regresi berganda. Untuk dapat mendeteksi ada tidaknya problem multikolinieritas pada sebuah model regresi, dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) dimana nilai VIF harus dibawah nilai 10. Jika nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) hasil regresi lebih besar dari 10 maka dapat dipastikan ada multikolinieritas diantara variabel bebas tersebut. Hasil uji multikolinieritas dapat ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
KMA	0.914	1.094	Terbebas dari multikolinieritas
KIN	0.906	1.104	Terbebas dari multikolinieritas
PRKI	0.974	1.027	Terbebas dari multikolinieritas
FRKA	0.982	1.018	Terbebas dari multikolinieritas

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas nilai VIF untuk seluruh variabel bebas terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan frekuensi rapat komite audit memiliki nilai VIF < 10. Sehingga model regresi yang diajukan dalam penelitian ini tidak mengandung gejala multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena varian gangguan berbeda antara satu observasi ke observasi lain. Untuk menguji Heteroskedastisitas digunakan uji Glejser. Dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya. Suatu model dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas apabila signifikansinya > 0,05 (Ghozali, 2007). Hasil uji heteroskedastisitas dapat ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Variabel	Sig.	Kesimpulan
KMA	.307	Terbebas dari heteroskedastisitas
KIN	.304	Terbebas dari heteroskedastisitas
PRKI	.243	Terbebas dari heteroskedastisitas
FRKA	.107	Terbebas dari heteroskedastisitas

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel $> \alpha$ (0,05). Kepemilikan manajerial (KMA) sebesar 0.307; kepemilikan institusional sebesar 0.304; proporsi dewan komisaris independen sebesar 0.243; frekuensi rapat komite audit sebesar 0.107. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

C. Hasil Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan frekuensi rapat komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hasil pengujian hipotesis disajikan dalam tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6.
Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel independen	Koef. Regresi (B)	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	0.500	0.055	9.126	0.000
KMA	0.094	0.034	2.728	0.007
KIN	0.066	0.027	2.475	0.014
PRKI	0.102	0.046	2.217	0.028
FRKA(%)	0.030	0.055	0.553	0.581
Adj R ²	0.083			
F Statistic	4.842			
Sig	0.001			

Sumber : Data sekunder diolah, 2018

1. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh hasil dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,083 atau 8,3%. Artinya, variabel *mandatory disclosure* dapat dijelaskan sebesar 8,3% oleh variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan frekuensi rapat komite audit. Sedangkan, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 4,842 dan sig-F sebesar 0,001, dengan demikian sig < 0,05, artinya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan rapat komite audit secara serentak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

3. Uji Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara individual signifikan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Hiptotesis akan dikatakan diterima apabila nilai sig < alpha 0.05.

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dilihat bahwa hasil dari perhitungan koefisien regresi dengan uji t yaitu sebagai berikut :

a. Uji Hipotesis Satu (H1)

Hasil pengujian dengan uji t, pada kepemilikan manajerial diperoleh nilai t hitung sebesar 2,728 dan sig (*probability*) sebesar $0,007 < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan “Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* (**berhasil didukung**).

b. Uji Hipotesis Dua (H2)

Hasil pengujian dengan uji t, pada kepemilikan institusional diperoleh nilai t hitung sebesar 2,475 dan sig (*probability*) sebesar $0,014 < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan “Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* (**berhasil didukung**).

c. Uji Hipotesis Tiga (H3)

Hasil pengujian dengan uji t, pada proporsi dewan komisaris independen diperoleh nilai t hitung sebesar 2,217 dan sig (*probability*) sebesar $0,028 < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan “Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* (**berhasil didukung**).

d. Uji Hipotesis Empat (H4)

Pengujian secara parsial pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap *Mandatory disclosure* diperoleh nilai t hitung sebesar 0,553 dan sig (*probability*) sebesar 0,581 > 0,05. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan “Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* (**berhasil didukung**).

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan hasil dari uji hipotesis pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Hasil
H1 Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure	Terdukung
H2 Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i>	Terdukung
H3 Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i>	Terdukung
H4 Frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i>	Tidak Terdukung

Sumber : Output SPSS 2017

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa persentase kepemilikan manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin besar persentase kepemilikan manajerial maka semakin besar pula tingkat pengungkapan wajib. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh teori agensi konflik kepentingan yang terjadi antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi wajib dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan .

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Utami *et al.*, (2012), Wulan *et al.*, (2012) dan Isna (2016), Widjayanti dan Wahidawati (2015) menggunakan proksi kepemilikan manajerial, membuktikan jumlah kepemilikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hal ini menunjukkan semakin besar jumlah insentif yang diterima oleh manajer semakin memotivasi manajer dalam

memaksimalkan kinerjanya. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Friscadella, (2017) menyatakan tidak ada pengaruh signifikan dari struktur kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Disebabkan oleh masih minimnya perusahaan yang mengungkapkan kepemilikan saham oleh manajemennya.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Hasil analisis menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional semakin besar tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Karena proporsi kepemilikan institusional dipandang mampu dalam memonitor kinerja yang dilakukan oleh manajemen dan mengurangi *agency cost*. Saham yang mayoritas dimiliki oleh institusi akan memiliki wewenang yang lebih besar untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Manajemen dapat melakukan perilaku yang dapat merugikan pihak institusi dengan melakukan tindakan-tindakan yang oportunistik. Oleh karena itu perusahaan diuntut untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas.

Jadi semakin besar kepemilikan yang dimiliki institusi maka semakin luas pula perusahaan melakukan pengungkapan informasi. Karena pihak investor ingin memperoleh informasi yang luas mengenai perusahaan. Kaitannya dengan pengungkapan wajib bahwa aktivitas

monitoring yang di lakukan oleh investor dapat memaksa manajemen untuk mengungkapkan informasi wajib pada laporan keuangan dan laporan tahunan.

Hasil penelitian Alvionita dan Taqwa (2015) berpendapat bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulan *et al.*, (2012) dan Isna (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat *kepatuhan mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS. Yang berarti tingkat kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurai insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri dengan melakukan pengawasan yang intens. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhani, (2017) menyatakan tidak berpengaruh signifikan dari adanya struktur kepemilikan institusional terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hal ini disebabkan pihak institusi yang berperan sebagai pemilik tidak bertanggung jawab terhadap tingkat pengungkapan wajib karena hanya menggunakan hasil akhir laporan keuangan bukan penyusun laporan keuangan.

3. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Hasil analisis menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap terhadap *mandatory disclosure*. Semakin besar proporsi komisaris independen maka semakin luas dalam pengungkapan *mandatory disclosure*. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh teori keagenan bahwa komisaris independen merupakan bagian penting sebagai pihak yang dapat menyelesaikan masalah keagenan yang terjadi antara *principal* dan *agen*. Dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan.

Dewan komisaris tidak dapat melakukan pengawasan secara efektif terhadap manajemen tanpa ada bantuan dari dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen dituntut untuk bersikap netral terhadap berbagai pihak yaitu pemegang saham, manajemen, karyawan agar dapat tercipta keseimbangan. Keseimbangan tercipta apabila dewan komisaris independen ikut melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen agar tindak penyimpangan dapat diminimalisir. Dengan adanya pengawasan ini maka manajemen akan mengungkapkan semua informasi tentang perusahaan. Oleh karena itu kaitannya dengan *mandatory disclosure* semakin besar jumlah dewan komisaris independen maka semakin banyak pula informasi yang diungkapkan manajemen. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widjayanti dan Wahidawati (2015) yang menjelaskan bahwa proporsi komisaris independen memiliki

pengaruh positif pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Penelitian Hafiz, *et al.*, (2015) juga menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*, dan penelitian yang dilakukan oleh Supriyono, *et al.*, (2014) bahwa jumlah komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan komisaris tersebut semakin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan (Nasution dan Setiawan, 2007). Berbeda dari hasil penelitian, Pitasari dan Septiani (2014) yang berpendapat bahwa jumlah anggota dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

4. Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Hasil analisis menemukan bahwa rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *Mandatory disclosure*. Artinya banyak sedikitnya rapat oleh komite audit tidak berpengaruh pada pengungkapan wajib dalam laporan keuangan. Hasil analisis menemukan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Mandatory disclosure*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Suhardjanto (2010) yang menemukan bahwa jumlah rapat komite audit

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Hal ini kemungkinan disebabkan banyak sedikitnya atau kuantitas dalam rapat komite audit belum mampu memberikan dampak yang nyata dalam pengungkapan wajib, tetapi lebih pada kualitas hasil rapat. Apa-apa saja yang dihasilkan dalam keputusan rapat lebih berpengaruh dibandingkan banyaknya atau frekuensi rapat. Selain itu kemungkinan disebabkan karena peraturan yang ditetapkan *corporate governance guidelines* (2007) belum berjalan baik di Indonesia. Peraturan yang ada hanya dijalankan sebagai formalitas demi menjaga image perusahaan itu sendiri.(Suhardjanto, 2010).

